



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 19 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023-2026**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, serta untuk mencapai keterpaduan perencanaan Pembangunan yang bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (satu tahunan) yang aspiratif dari seluruh masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;  
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Agenda Kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

- b. Mengumpulkan, mengkaji, menganalisis data, dan informasi;
- c. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
- d. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
- e. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
- f. Mengusulkan Penetapan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dan/atau Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026; dan
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 26 Januari 2022

  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
**EDDY RAYA SAMSURI**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 19 / 2022  
TANGGAL : 26 Januari 2022  
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026**

NO.	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<b>I.</b>	<b>TIM INTI</b>	
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>II.</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP.,M.A.P / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	KUSMIATIE, SH / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	YANA TARIENI, A.Md / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

8.	WISNU SAPUTRA, SE / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	WIWIK MEYDAYATI, SE / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	SUGIANTO, S.Pd / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	KHAIRIN IKI IWAN, A.Md / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	HARTADI, A.Md / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	IRA TIKE PRETYSIA / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	RUDIYANTO NOVANDI. A/ Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	SAHRIL RAHMAN / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota


**BUPATI BARITO SELATAN,**  
**EDDY RAYA SAMSURI**